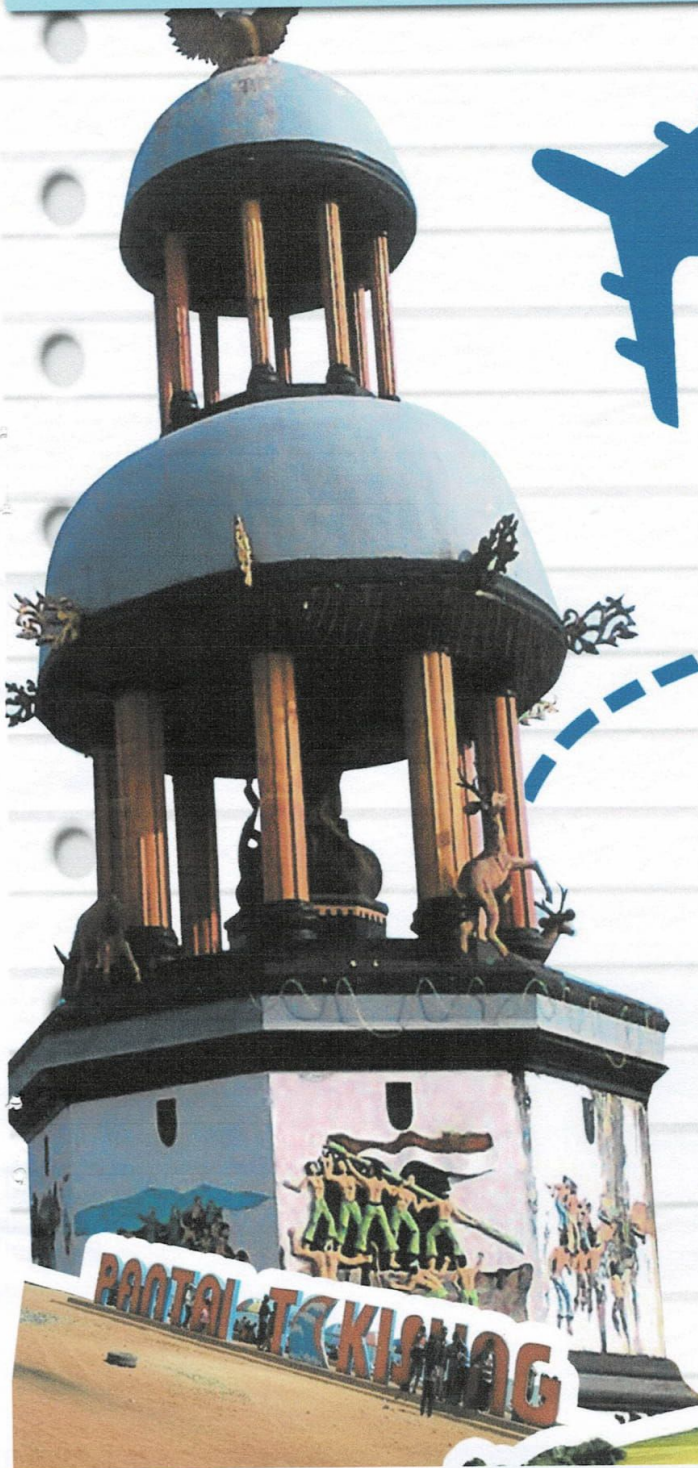




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN SKPD TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019.

Landasan dari Pembuatan Laporan ini adalah Surat Bupati Tanah Laut Nomor :130 /173/Tapem Perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan kepada DPRD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang telah berjalan,.

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban SKPD ini kami rasa masih jauh dari sempurna, namun paling tidak dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Dengan kerendahan hati diharapkan adanya suatu saran serta masukan untuk kesempurnaan penyajian yang akan datang.

Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat diselesaikannya penyusunan LKPJ & LPPD – SKPD ini.

Pelaihari, Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tanah Laut



Drs. Joko Wuryanto, M.Si
NIP.1965011619921008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
BAB I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
a. Dasar Hukum	1
2. Gambaran Umum SKPD	3
a. Struktur Organisasi.....	3
b. Kepegawaian	5
c. Kondisi Sarana dan Prasarana	8
d. Data Statistik.....	11
1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	11
2) Penanaman Modal	24
BAB II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)...	26
b. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan.....	26
c. Program dan Kegiatan.....	27
d. Alokasi dan realisasi anggaran.....	29
e. Permasalahan dan Solusi	2
BAB III Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	37
BAB IV Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	37
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	38
2. Keberhasilan.....	39